

SIMPLE INTERNAL AUDIT TRAINING TO ENHANCE THE ACCOUNTABILITY OF NONPROFIT ORGANIZATIONS

PELATIHAN AUDIT INTERNAL SEDERHANA UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS ORGANISASI NONPROFIT

Muhammad Hidayat¹, Eko Prasetyo²

Universitas Persada Bunda Indonesia¹, Universitas Negeri Surabaya²

*muhammad.hidayat@upbi.ac.id, eko89905@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study examines the efficacy of a simplified internal audit training intervention in enhancing governance literacy and financial accountability among non-profit organizations, specifically focusing on coffee farmer cooperatives in Jember, Indonesia. Utilizing a Participatory Action Research (PAR) methodology, the intervention engaged 15 participants through a structured cycle of pre-assessment, tailored-made training modules, and mentoring. The findings reveal a statistically significant improvement in the participants' governance literacy, with the overall mean score increasing from 2.02 to 4.23. The results demonstrate that simplifying internal audit procedures focusing on segregation of duties, reliable transaction recording, and systematic documentation successfully transforms theoretical understanding into practical control-based management. This study contributes to the literature by affirming that for grassroots non-profit organizations, the adoption of adaptive, risk-based internal audit mechanisms serves as a catalyst for institutional legitimacy and member trust, rather than relying on complex corporate-standard compliance. The study recommends continuous mentorship and the integration of digital, cloud-based bookkeeping to ensure sustainable accountability in the non-profit sector.

Keywords: Internal Audit, Non-profit Organizations, Governance Literacy, Accountability, Participatory Action Research, Financial Transparency.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efikasi intervensi pelatihan audit internal sederhana dalam meningkatkan literasi tata kelola dan akuntabilitas keuangan pada organisasi nirlaba, dengan fokus khusus pada koperasi petani kopi di Jember, Indonesia. Menggunakan metodologi Participatory Action Research (PAR), intervensi melibatkan 15 peserta melalui siklus terstruktur yang terdiri dari penilaian awal, modul pelatihan tailored made, dan pendampingan (mentoring). Temuan menunjukkan peningkatan yang signifikan secara statistik pada literasi tata kelola peserta, dengan kenaikan skor rata-rata dari 2,02 menjadi 4,23. Hasil ini membuktikan bahwa penyederhanaan prosedur audit internal yang berfokus pada pemisahan tugas, pencatatan transaksi yang reliabel, dan dokumentasi sistematis berhasil mentransformasi pemahaman teoritis menjadi manajemen berbasis kendali yang aplikatif. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan menegaskan bahwa bagi organisasi nirlaba, adopsi mekanisme audit internal yang adaptif dan berbasis risiko merupakan katalis bagi legitimasi kelembagaan dan kepercayaan anggota, dibandingkan harus bergantung pada kepatuhan standar korporasi yang kompleks. Studi ini merekomendasikan pendampingan berkelanjutan dan integrasi pembukuan digital berbasis cloud untuk memastikan akuntabilitas yang berkelanjutan di sektor nirlaba.

Kata Kunci: Audit Internal, Organisasi Nirlaba, Literasi Tata Kelola, Akuntabilitas, Participatory Action Research, Transparansi Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba (non profit organizations/NPO) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial melalui penyediaan layanan publik, pengelolaan dana filantropi, serta pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi pada keuntungan, legitimasi organisasi nirlaba sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan para

pemangku kepentingan terhadap integritas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Oleh karena itu, tata kelola organisasi (*good governance*) menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Penerapan prinsip-prinsip tersebut terbukti mampu meningkatkan kredibilitas organisasi, memperkuat kepercayaan publik, sekaligus menurunkan risiko terjadinya penyimpangan atau fraud (Elwan, 2022; Marciano et al., 2018; Lenap et al., 2023; Sari, 2023).

Dalam perspektif tata kelola organisasi, akuntabilitas keuangan merupakan salah satu dimensi yang paling menentukan keberlanjutan organisasi nirlaba. Namun demikian, berbagai organisasi nirlaba, khususnya yang beroperasi pada tingkat akar rumput (*grassroots organizations*), masih menghadapi keterbatasan kapasitas dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang memadai. Kondisi tersebut tercermin dari lemahnya dokumentasi transaksi, belum optimalnya pemisahan fungsi (*segregation of duties*), serta rendahnya kualitas sistem pelaporan keuangan. Akibatnya, tuntutan akuntabilitas dari donor, regulator, maupun masyarakat sering kali tidak sejalan dengan kemampuan organisasi dalam menyajikan informasi keuangan yang transparan. Berbagai penelitian pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat publikasi laporan keuangan melalui media daring masih relatif rendah, sehingga mencerminkan adanya kesenjangan antara ekspektasi pemangku kepentingan dengan kapasitas pelaporan organisasi (Karim et al., 2019; Thahir et al., 2021; Aryana, 2022). Sejalan dengan temuan tersebut, peningkatan transparansi serta kualitas pelaporan keuangan dipandang sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan *good zakat governance* (Thahir et al., 2021; Aryana, 2022).

Upaya memperkuat tata kelola keuangan organisasi nirlaba juga tidak dapat dipisahkan dari peran regulasi dan sistem pengawasan yang dibangun oleh negara. Standar pelaporan keuangan, kewajiban audit, serta mekanisme pengawasan eksternal merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas organisasi. Walaupun implementasinya masih menunjukkan variasi antarorganisasi, keberadaan regulasi tersebut memberikan kerangka institusional yang mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan secara berkelanjutan (Sugiyanto, 2021; Thahir et al., 2021; Aryana, 2022).

Selain faktor regulasi, efektivitas tata kelola organisasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan mekanisme pengendalian internal (*internal control*). Sistem pengendalian internal yang memadai memungkinkan organisasi mendeteksi penyimpangan sejak dini, meminimalkan kesalahan administratif, serta meningkatkan reliabilitas informasi keuangan. Akan tetapi, banyak organisasi nirlaba skala kecil dan menengah belum menerapkan audit internal secara optimal karena keterbatasan sumber daya, biaya, maupun kompetensi teknis. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem audit internal yang sederhana sekalipun mampu meningkatkan kepatuhan organisasi, memperkuat integritas pelaporan keuangan, serta membangun kepercayaan publik sebagai modal penting bagi keberlanjutan organisasi (Thahir et al., 2021; Megasyara & Imawan, 2023; Paristu, 2014). Pada organisasi berbasis syariah, fungsi audit internal memiliki peran yang lebih luas, yaitu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus menjaga integritas proses operasional dan pelaporan keuangan (Arifin et al., 2023; Fatimah & Ainulyaqin, 2022).

Efektivitas pengendalian internal juga dipengaruhi oleh keberadaan struktur pengawasan organisasi, seperti komite audit dan fungsi audit internal yang independen. Literatur menunjukkan bahwa komite audit berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola melalui pengawasan atas penyusunan laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta deteksi dini terhadap potensi fraud. Organisasi yang memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas, lebih transparan, dan lebih dipercaya oleh para pemangku kepentingan (Ikhsan & Sianturi, 2014; Pasoloran & Randa, 2022; Marciano et al., 2018; Lenap et al., 2023).

Pentingnya tata kelola yang baik semakin terlihat pada organisasi filantropi Islam, khususnya lembaga pengelola zakat dan wakaf. Pengelolaan dana sosial keagamaan menuntut tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi karena dana yang dihimpun merupakan amanah masyarakat. Oleh sebab itu, implementasi good zakat governance menekankan pentingnya transparansi, penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar, serta pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dan masyarakat luas (Thahir et al., 2021; Aryana, 2022; Ayumiati, 2018; Lenap et al., 2023). Dalam konteks pengelolaan wakaf di Indonesia, keberadaan Waqf Core Principles (WCP) dan PSAK 112 menjadi pedoman penting dalam memperkuat tata kelola nazhir melalui penerapan pelaporan keuangan yang akuntabel, kepatuhan syariah, dan mekanisme audit eksternal (Aryana, 2022; Lenap et al., 2023).

Pada institusi keuangan Islam, kajian mengenai audit internal syariah semakin memperjelas bahwa efektivitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fungsi audit, tetapi juga oleh independensi auditor, kompetensi sumber daya manusia, struktur organisasi, serta dukungan manajemen puncak terhadap fungsi pengawasan. Audit internal syariah yang efektif mampu memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan pengendalian operasional organisasi (Arifin et al., 2023; Fatimah & Ainulyaqin, 2022). Efektivitas tersebut dipengaruhi oleh kejelasan kerangka kerja audit, prosedur audit yang memadai, serta komitmen organisasi dalam mendukung fungsi pengawasan internal (Arifin et al., 2023).

Temuan-temuan tersebut juga didukung oleh berbagai penelitian pada institusi keagamaan lainnya, seperti gereja, pondok pesantren, dan berbagai organisasi nonprofit berbasis keagamaan. Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi tata kelola yang baik, didukung oleh audit eksternal, komite audit, serta mekanisme whistleblowing, mampu meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas finansial, dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana organisasi (Pasoloran & Randa, 2022; Patawaran & Restuti, 2023; Ayumiati, 2018; Marciano et al., 2018; Sari, 2023). Selain itu, mekanisme pengawasan dan pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam mitigasi fraud pada organisasi nonprofit (Sari, 2023; Joloko & Audu, 2019).

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa tata kelola organisasi nirlaba yang efektif dibangun melalui integrasi antara transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, audit internal dan eksternal, serta dukungan regulasi yang memadai. Meskipun demikian, sebagian besar organisasi nirlaba, khususnya organisasi berskala kecil dan berbasis komunitas, masih menghadapi kesenjangan antara tuntutan akuntabilitas publik dengan kapasitas kelembagaan yang dimiliki. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola keuangan, sistem pengawasan internal, serta mekanisme audit tidak hanya merupakan kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam meningkatkan legitimasi, keberlanjutan organisasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi nirlaba.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut melalui intervensi pelatihan audit internal yang disesuaikan (*tailored-made*) dengan skala operasional organisasi nonprofit. Fokus utama dari inisiatif ini adalah untuk menjembatani literasi tata kelola (*governance literacy*) pengurus organisasi, mentransformasi pemahaman teknis akuntansi menjadi perilaku kontrol yang aplikatif. Dengan menyederhanakan standar audit agar mudah diimplementasikan, organisasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal mereka tanpa harus dibebani oleh prosedur yang terlalu rumit.

Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk mengukur efikasi pelatihan audit internal dalam meningkatkan *governance literacy* dan kesiapan organisasi nonprofit dalam menyajikan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Melalui integrasi antara pelatihan kognitif dan pendampingan praktis, pengabdian ini berupaya memfasilitasi pergeseran paradigma dari manajemen keuangan berbasis intuisi menuju praktik pengelolaan

berbasis kendali (*control-based management*), sehingga memberikan kontribusi nyata bagi penguatan integritas sektor non profit di wilayah terkait.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini mengadopsi metodologi *Participatory Action Research* (PAR) untuk menjembatani kesenjangan antara praktek pengelolaan keuangan koperasi dan standar akuntabilitas organisasi. Pendekatan PAR dipilih karena karakteristiknya yang menempatkan anggota koperasi sebagai subjek penggerak perubahan, bukan sekadar objek penerima pelatihan. Lokasi kegiatan ditetapkan pada salah satu Koperasi Petani Kopi di Kabupaten Jember yang memiliki volume transaksi signifikan namun masih menghadapi kendala dalam sistem pengendalian internal. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi sektor agribisnis di Jember yang memerlukan tata kelola profesional guna menjaga kepercayaan anggota (*member trust*) dan kredibilitas operasional di mata pemangku kepentingan.

Tahapan intervensi dilakukan dalam tiga siklus integratif. Tahap pertama adalah *pre-test* sebanyak 15 peserta, yang bertujuan untuk memetakan level *governance literacy* pengurus dan mengidentifikasi hambatan administratif yang paling dominan. Tahap kedua adalah pemberian intervensi melalui pelatihan intensif dengan modul audit internal sederhana. Materi pelatihan mencakup tiga pilar utama: (1) Prinsip dasar pengendalian internal pada koperasi; (2) Mekanisme pencatatan transaksi yang reliabel; dan (3) Prosedur dokumentasi untuk memastikan jejak audit (*audit trail*) yang akuntabel. Modul ini didesain secara *tailored-made* agar kompatibel dengan operasional harian petani kopi.

Tahap ketiga, yaitu *mentoring*, menitikberatkan pada pendampingan implementasi *tools* audit. Pada fase ini, pengurus koperasi didampingi dalam melakukan simulasi pemeriksaan dokumen transaksi riil. Pendekatan ini bertujuan untuk menginternalisasi prosedur audit ke dalam rutinitas operasional agar perubahan perilaku pengelolaan keuangan bersifat berkelanjutan (*sustainable*). Penggunaan *tools* audit yang sederhana namun sistematis diharapkan mampu memitigasi risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan transparansi laporan keuangan koperasi.

Evaluasi efikasi intervensi dilaksanakan melalui dua instrumen utama. Pertama, instrumen kuesioner *pre-test* dan *post-test* digunakan untuk mengukur peningkatan skor *governance literacy* secara kuantitatif. Kedua, lembar observasi partisipasi digunakan untuk memonitor keterlibatan aktif dan perubahan perilaku pengurus selama fase *mentoring*. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk menguji dampak pelatihan terhadap kesiapan organisasi dalam menyajikan laporan yang transparan, sekaligus memberikan kontribusi teoritis mengenai efektivitas audit internal dalam memperkuat tata kelola organisasi berbasis komunitas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Profil Responden dan Literasi Tata Kelola Awal

Pemetaan kondisi awal menunjukkan bahwa pengurus Koperasi Petani Kopi di Jember memiliki keterikatan emosional yang tinggi terhadap keberlangsungan organisasi, namun mengalami *gap* signifikan dalam literasi tata kelola (*governance literacy*). Hasil *pre-test* mengindikasikan bahwa mayoritas pengurus memandang pencatatan transaksi hanya sebagai formalitas administratif untuk memenuhi persyaratan internal, bukan sebagai instrumen pengendalian risiko. Rendahnya pemahaman mengenai pentingnya *segregation of duties* dan prosedur audit internal mendasar menjadi faktor utama yang membatasi kemampuan koperasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Tabel 1: Analisis Peningkatan Governance Literacy Peserta Pelatihan

Indikator Kompetensi	Skor Rata-rata Pre Test	Skor Rata-rata Post Test	Peningkatan (Gain)
Pemahaman Kontrol Internal	2.15	4.3	2.15
Teknik Dokumentasi Transaksi	1.9	4.45	2.55
Prosedur Audit Internal Dasar	1.85	4.1	2.25
Kesiapan Pelaporan Keuangan	2.2	4.25	2.05
Deteksi Risiko Administrasi	2	4.05	2.05
Skor Rata-rata Keseluruhan	2.02	4.23	2.21

Sumber: Data Diolah, 2026

3.2 Analisis Peningkatan Literasi dan Kesiapan Organisasi

Data *post-test* menunjukkan peningkatan yang signifikan secara statistik pada skor literasi tata kelola peserta setelah mengikuti pelatihan audit internal sederhana. Peningkatan skor rata-rata pada indikator pemahaman pengendalian internal dan teknik dokumentasi membuktikan bahwa modul yang dirancang secara *tailored-made* mampu mentransformasi pemahaman teoritis menjadi kompetensi praktis. Selain itu, lembar observasi menunjukkan bahwa peserta kini lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi kesalahan administratif dan lebih konsisten dalam menerapkan prosedur dokumentasi transaksi, yang secara langsung meningkatkan kesiapan organisasi dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih andal.

3.3 Audit Internal sebagai Instrumen Akuntabilitas

Penerapan prosedur audit internal yang sederhana terbukti menjadi *catalyst* bagi peningkatan akuntabilitas organisasi nonprofit. Temuan ini menegaskan bahwa kompleksitas sistem akuntansi bukan merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai transparansi; sebaliknya, kepatuhan terhadap prosedur audit yang konsisten dan sistematis jauh lebih esensial. Dengan mengadopsi mekanisme audit internal yang adaptif, koperasi tidak hanya mampu memitigasi risiko *mismanagement* keuangan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan anggota (*member trust*) terhadap pengurus. Hal ini sejalan dengan *stewardship theory*, di mana peningkatan transparansi finansial melalui pengawasan internal akan berdampak positif pada komitmen dan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi.

3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Keberhasilan intervensi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial. Faktor pendukung utama adalah keterbukaan pengurus untuk mengadopsi sistem baru guna menjamin keberlanjutan koperasi di tengah ketatnya persaingan pasar kopi. Namun, hambatan budaya organisasi tetap menjadi tantangan, terutama persepsi bahwa audit merupakan proses "pengawasan yang menghakimi" daripada "fungsi pendukung kualitas". Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang fokus pada fungsi administratif juga menjadi kendala dalam menjaga keberlanjutan implementasi *tools* audit setelah pendampingan berakhir. Oleh karena itu, diperlukan internalisasi nilai-nilai akuntabilitas secara kontinu agar praktik audit internal dapat menjadi budaya organisasi yang mendarah daging, melampaui sekadar kepatuhan administratif sesaat.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Ringkasan Dampak Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini secara empiris membuktikan bahwa intervensi audit internal sederhana memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan *governance literacy* pengurus Koperasi Petani Kopi di Jember. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), ditemukan bahwa hambatan utama akuntabilitas organisasi bukan terletak pada ketiadaan sistem yang canggih, melainkan pada rendahnya pemahaman

mengenai fungsi pengawasan internal sebagai instrumen keberlanjutan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari manajemen keuangan berbasis intuisi menuju praktik pengendalian berbasis dokumen. Peningkatan kesiapan organisasi dalam menyajikan laporan yang transparan bukan sekadar capaian administratif, melainkan fondasi bagi penguatan integritas sektor non profit di tingkat lokal.

4.2 Saran Strategis bagi Pengembangan Model Akuntabilitas

Berdasarkan hasil pengabdian ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk mendukung pengembangan model akuntabilitas organisasi non profit yang berkelanjutan. Pertama, organisasi nonprofit disarankan untuk mengadopsi model audit internal yang disesuaikan (tailor-made) dengan karakteristik dan risiko operasional organisasi, bukan mengimplementasikan secara penuh standar audit korporasi yang cenderung kompleks. Model audit yang sederhana namun sistematis diharapkan tetap mampu menjamin penerapan prinsip-prinsip dasar pengendalian internal, seperti pemisahan tugas, dokumentasi transaksi yang memadai, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Kedua, organisasi perlu menginternalisasikan budaya pengawasan dengan memposisikan fungsi audit internal sebagai mitra pendamping yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, bukan sebagai pihak yang semata-mata menjalankan fungsi penilaian atau penghakiman. Pendekatan ini memerlukan komitmen pimpinan organisasi dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap evaluasi. Ketiga, seiring dengan perkembangan transformasi digital, organisasi nonprofit perlu memperkuat literasi digital melalui pemanfaatan teknologi keuangan sederhana, seperti sistem pembukuan berbasis cloud (cloud-based bookkeeping), guna meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, mengurangi potensi human error, serta mempermudah penyusunan laporan keuangan yang akuntabel kepada para pemangku kepentingan. Terakhir, keberlanjutan peningkatan tata kelola organisasi memerlukan kolaborasi yang lebih erat antara perguruan tinggi dan organisasi nonprofit melalui program pendampingan yang berkesinambungan. Dibandingkan pelatihan yang bersifat satu kali, skema mentoring jangka panjang dinilai lebih efektif dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, menginternalisasikan praktik tata kelola yang baik, serta memastikan implementasi sistem akuntabilitas yang berkelanjutan.

Implementasi dari rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi organisasi nonprofit lainnya di wilayah Jember dan sekitarnya dalam upaya membangun sistem akuntabilitas yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing di tengah tantangan tata kelola modern.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. A. L., Husna, A., & Siregar, N. M. (2023). Audit internal syariah dan faktor efektivitas pada bank syariah. *JEMSI (Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi)*, 9(3), 1027–1041. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1229>
- Aryana, K. P. (2022). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Ayumiati, A. (2018). Akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan (Studi pada Baitulmal Kota Langsa). *Ekobis Syariah*, 2(2), 35–48. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i2.10105>
- Elwan, A. (2022). Peran yayasan dalam aras kewenangan untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi swasta yang baik (Good University Governance). *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 1(2), 67–79. <https://doi.org/10.55850/simbol.v1i2.14>
- Fatimah, N., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Efektivitas audit internal syariah di perbankan syariah. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(11), 1179–1187. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i11.530>

- Ikhsan, A., & Sianturi, A. M. (2014). Komite audit untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan penyajian laporan keuangan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah (Studi kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(1), 1–28. <https://doi.org/10.25105/jmat.v1i1.4903>
- Joloko, B., & Audu, S. (2019). Curbing fraudulent practices through accountability in non-profit making organizations. *Research Journal of Finance and Accounting*, 10(14). <https://doi.org/10.7176/RJFA/10-14-01>
- Karim, N. K., Sasanti, E. E., Lenap, I. P., & Kartikasari, N. (2019). Untitled. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 13–27. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v18i2.74>
- Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2023). Implementasi Syariah Governance berbasis Waqf Core Principles pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi NTB. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 205–217. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.193>
- Marciano, B., Syam, A., Suyanto, S., Ahmar, N., & Gayatri, M. (2018). Penerapan Good Corporate Governance terhadap pencegahan fraud: Sebuah literature review. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 152–161. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i3.528>
- Megasyara, I., & Imawan, A. (2023). Implementasi Good Government sebagai upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 512–528. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23525>
- Paristu, A. I. (2014). Sistem pengendalian internal pada lembaga amil zakat (Studi komparatif Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 150–168. <https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3585>
- Pasoloran, O., & Randa, F. (2022). Struktur dan mekanisme tata kelola lembaga kerohanian. *Pepatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, 18(2), 126–138. <https://doi.org/10.35329/fkip.v18i2.3768>
- Patawaran, N., & Restuti, M. D. (2023). Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Church Governance pada Gereja Toraja? *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(3), 415–427. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7261>
- Sari, P. S. A. (2023). Whistleblowing sebagai strategi peningkatan tata kelola perusahaan. *Owner*, 7(3), 2401–2410. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1561>
- Sugiyanto, S. (2021). Akuntabilitas lembaga kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 32–44. <https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.20440>
- Thahir, A. H., Tohari, I., & Rahman, Z. Abd. (2021). Implementasi akuntabilitas dan transparansi zakat: Pengembangan sumber daya manusia di Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 77–93. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.77-93>